

## The Effect of the Electoral System on Women's Elections in Parliament (Case Study of South Korea)

### Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterpilihan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus Korea Selatan)

**Hilda Indah Bahirah**

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia 12450. e-mail: [hildaib@upnvj.ac.id](mailto:hildaib@upnvj.ac.id)

---

#### **Abstract**

*This paper aims to examine the effect of the general election system on women's electability in the South Korean parliament. South Korea, which is known as a great economic and human development country, in fact, when it comes to issues of gender equality is not comparable to the greatness of the country. In this context, South Korea received the title as one of the countries with a high gender gap. The research method used in this paper is qualitative-descriptive. The results of this study indicate that the gap between women and men in South Korea is still high so that the number of women involved in parliament is still very limited. In addition, there are still several inhibiting factors when women want to become members of parliament. Whereas the presence of women in Parliament is a very important thing because they are considered to be able to bring ideas and ideas that can represent the interests of their constituents. The presence of a proportional representation system does indeed seem to provide a positive enough opportunity to increase the representation of women in the South Korean Parliament through a 30% quota which is believed to be sufficient to provide good things for effective and efficient elections in legislative elections. Even though this proportional representation system is not fully capable of bringing about such significant changes in results, at least the existence of this system is enough to help women improve their representation, or it can be said that slowly, but the results are enough to bring bigger changes to women's representation in parliament.*

**Keywords:** *gender gap, South Korea, women's representation, proportional system*

#### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dari sistem pemilihan umum terhadap keterpilihan perempuan di parlemen korea selatan. Korea Selatan yang dikenal dengan negara ekonomi dan pembangunan manusia yang sangat hebat, nyatanya apabila dikaitkan dengan permasalahan kesetaraan gender tidaklah sebanding dengan kehebatan negara tersebut. Dalam konteks ini, Korea Selatan menerima predikat sebagai salah satu negara yang kesenjangan gendernya tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Korea Selatan masih tinggi sehingga jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen juga masih sangat terbatas. Selain itu juga masih ada beberapa faktor penghambat ketika perempuan ingin menjadi anggota parlemen. Padahal kehadiran perempuan di Parlemen merupakan suatu hal yang sangat penting karena dianggap bisa membawa ide dan gagasan yang bisa merepresentasikan kepentingan konstituennya. Hadirnya sistem representasi proporsional memang terlihat memberikan peluang yang cukup positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen Korea Selatan melalui kuota 30% yang diyakini cukup memberikan hal yang baik bagi pemilihan yang efektif dan efisien dalam pemilu legislatif. Meskipun memang tidak sepenuhnya juga sistem representasi proposional ini bisa*

*membawa perubahan hasil yang sedemikian signifikan, tetapi setidaknya adanya sistem ini cukup membantu perempuan dalam memperbaiki peningkatan representasinya, atau bisa dikatakan pelan-pelan tapi hasilnya cukup membawa perubahan-perubahan lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen.*

***Kata kunci:*** kesenjangan gender, Korea Selatan, keterwakilan perempuan, sistem proporsional

---

## 1. PENDAHULUAN

Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur, yang semula merupakan bagian dari Korea sebelum akhirnya sekitar tahun 1950an terpecah menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam konteks ini, sejak tahun 1990-an, Korea Selatan bisa survive dari negara yang bisa dikatakan dulu tidak berkembang sekarang justru menjadi negara cukup kaya dan bahkan mampu memasuki jenjang elite negara industri dunia. Tentunya hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan yang positif pada sektor ekonominya sehingga Korea Selatan yang ber-ibukota Seoul ini juga menjadi sorotan negara-negara lain di dunia, dikarenakan kinerja dari parlemennya bisa dikatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari RUU dan UU yang mereka rancang dan sahkan, sebab sejatinya memang baik dan buruknya suatu parlemen di suatu negara itu bisa dilihat dari bagaimana cara mereka merancang dan mengesahkan UU.

Sistem politik yang digunakan oleh Korea Selatan adalah sistem “Kukhoe” atau Korean National Assembly (KNA). Dalam konteks ini KNA menjadi satu-satunya penguasa legislatif di negeri ginseng tersebut. Diketahui bahwa KNA diselenggarakan empat tahun sekali di sekitar 246 daerah pemilihan, terdiri dari 300 kursi, kemudian ditambah dengan 54 kursi lagi untuk dibagikan kepada parpol dengan proporsi suara yang diperoleh (Brata et al., 2015). Hal tersebut tentunya dilakukan melalui apa yang dikenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu), pemilu adalah salah satu cara untuk pendistribusian ide-ide warga negara sebagai bentuk dari adanya demokrasi pada suatu negara. Sekitar tahun 1948, Korea Selatan sendiri telah mengadopsi pemilu dalam Konstitusi, yang mana artinya harus diadakan disemua pemilihan baik itu presiden ataupun parlemen. Dalam konteks ini, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup tinggi sebab telah menggunakan teknologi setiap diadakannya penyelenggaraan pemilu dan hal ini diketahui sudah dilakukan diseluruh daerah.

Pemilu dalam konteks ini ingin coba dikaitkan dengan permasalahan gender, yang mana seperti kita tahu perempuan di Korea Selatan memang telah merasakan berkembangnya pembangunan seperti dalam bidang ekonomi, modernisasi dan demokratisasi. Bahkan Korea Selatan pada tahun 2013, telah dinobatkan sebagai negara dengan perekonomian nomor 4 di Asia dengan pendapatan perkapita sebesar kurang lebih 33.200 dollar AS (CIA, 2014). Selain itu Korea Selatan termasuk pada kelompok negara yang memiliki level kategori cukup tinggi dalam pembangunan manusianya yaitu berada pada urutan 12 di United Nations Human Development Index (HDI) tahun 2012 (UNDP, 2013). Dari sisi eksekutif pun diketahui juga bahwa perempuan telah mengalami berbagai kemajuan dalam ranah politik. Namun, sayangnya hal serupa tidak terjadi dalam parlemen di Korea Selatan, keterwakilan perempuan disana memang terlihat masih sangat rendah dan belum setara dengan laki-laki. Inilah yang membuat Korea Selatan menerima julukan sebagai salah satu negara yang memiliki kesenjangan gender tinggi.

Berlandaskan pada persoalan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji apakah sistem representasi proporsional dalam pemilihan umum bisa berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di parlemen korea selatan sebab kesenjangan antara perempuan dan laki-laki memang masih sangat terlihat di Korea Selatan. Dari permasalahan tersebut juga muncul beberapa pertanyaan seperti : bagaimana angka keterwakilan perempuan di parlemen Korea Selatan? Kemudian apakah dengan adanya pemilihan model proporsional representasi dapat memberikan peluang yang lebih baik untuk keterwakilan perempuan menjadi anggota parlemen? Dan terakhir, apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat perempuan saat ingin menjadi anggota parlemen?

Menurut jurnal yang berjudul “Upaya Korea Women’s Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan” ditemukan bahwa di bidang politik kesetaraan antara perempuan dan laki-laki bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih sangat sedikitnya para perempuan untuk dapat turut serta di dalam parlemen, sekalipun memiliki kesempatan tetap saja pencapaiannya masih terlihat cukup sulit. Hal ini dikarenakan dua hal seperti masih melekatnya budaya patriarki dan konfusianisme di masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Tentunya dalam konteks ini, organisasi KWAU yang berisikan masyarakat sipil Korea Selatan telah mencoba melakukan berbagai usaha demi bisa tercapainya kesetaraan gender khususnya di ranah politik. Usaha-usaha tersebutpun dilakukan sesuai dengan prinsip dari KWAU itu sendiri yakni “as representative, as advocate, as defines of standart, as citizenship champion, as solidarity supporter dan as watchdog”.

Usaha yang dilakukan yaitu seperti halnya ikut turut serta dalam parlemen, kemudian merencanakan adanya pertemuan secara terus-menerus dengan para anggota parlemen, partai politik atau pembuat kebijakan, yang mana ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan serta keinginan para perempuan. Selain itu KWAU juga merancang gagasan-gagasan yang pada akhirnya ikut diajukan kepada parlemen, serta juga ikut berpartisipasi dalam memperbaiki Undang-Undang. Dan hal yang jauh tidak kalah penting, KWAU juga melakukan berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menyediakan ruang publik bagi mereka-mereka yang ingin mengutarakan kepentingan dan idenya, kemudian membuat acara yang pastinya melibatkan banyak masyarakat, yang berujung pada pertemuan dengan para aktivis perempuan, bahkan mereka juga memantau jalannya partai politik, para pejabat dan kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu posisinya berlainan dengan riset saat ini, sebab peneliti lebih fokus terhadap posisi dan data mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen Korea Selatan dan peluang atas hadirnya model proporsional representasi dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen serta hal-hal apa saja yang menghambat perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam keanggotaan parlemen. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus membahas upaya dari Korea Women’s Assosiation United sebagai masyarakat sipil untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam segala hal terutama dalam ranah politik di Korea Selatan seperti turut mengajukan kebijakan-kebijakan mengenai perempuan kepada parlemen.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, yang mana menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif ini pada akhirnya akan melahirkan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan dari suatu realitas ataupun perilaku target yang sedang diteliti (Suwendra, 2018). Hasil dari penelitian kualitatif ini juga dianalisa menggunakan berbagai pendekatan, teori dan juga konsep yang relate dengan topik yang dibahas, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memanifestasikan sebuah permasalahan, fakta dan realitas secara lebih menyebar serta mendalam tanpa menciptakan perkiraan belaka (Raco, 2018).

Saat melaksanakan riset ini penulis mengaplikasikan teknik pengumpulan dokumentasi (document research), dimana hal itu dilaksanakan melalui studi literatur yang berasal dari buku, situs resmi, jurnal online, makalah resmi, majalah terpercaya serta sumber-sumber lainnya dengan harapan bisa mendapatkan hasil berupa informasi fakta yang berhubungan dengan isu yang sedang dikaji. Selain itu penulis juga memasukkan data tambahan atau sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur yang telah dikerjakan dan ditelaah (Sawarjuwono, 2003). Tidak lupa juga bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi ini dianalisis terlebih dahulu secara teliti dan sungguh-sungguh agar dapat menunjang proposisi dan ide yang ada.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Keterwakilan Perempuan di Parlemen Korea Selatan

Menurut informasi yang didapatkan dari World Economic Forum's tahun 2021, diketahui bahwa pada konteks kesetaraan gender, Korea Selatan berada pada peringkat 102 dari 156 negara (Weforum, 2021). Dalam konteks ini, seharusnya perempuan bisa mendapatkan peluang yang sama untuk mewakili kepentingan sesama perempuan dengan cara turut serta dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan jumlah perempuan di parlemen itu memiliki keterkaitan yang erat untuk kemajuan kebijakan publik khususnya yang mencakup kepentingan perempuan dan anak. Namun, pada faktanya sangat disayangkan bahwa ternyata jumlah perempuan yang ikut terlibat dalam wilayah politik terutama dalam anggota parlemen itu bisa dikatakan masih sangat terbatas (Iwanaga, 2008). Ini bisa dilihat dari pemilihan Majelis Nasional ke-20 tahun 2016, yang mana dari total seluruh kursi, perempuan Korea Selatan hanya mampu untuk menjadi anggota parlemen sebanyak 17%. Hal serupa juga dikemukakan oleh UN Women, dimana berdasarkan data pemilihan Majelis Nasional ke-21, dari total 300 kursi, perempuan Korea Selatan hanya bisa menempati 19% kursi di parlemen (UN Women, 2020).

Data tersebut tentunya menunjukkan bahwa memang masih sangat terlihat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Diketahui bahwa di seluruh dunia, anggota parlemen perempuan itu hanya ada kurang lebih 18%, padahal lagi-lagi penting untuk ditekankan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen ini sifatnya sangat penting sebab apabila perempuan dalam konteks ini bisa menjadi subjek bukan hanya sekedar objek, maka disitulah mereka memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan. Lalu dimana sisi pentingnya? Kita bisa menggunakan logika sederhana, dimana apabila parlemen itu isinya hanya laki-laki saja, maka kepentingan perempuan kemungkinan besar akan terabaikan karena laki-laki tidak bisa seutuhnya memperantarai kebutuhan dan keinginan perempuan sebab ada perbedaan aspirasi dan kepentingan diantara keduanya. Oleh karena itu perempuan tidak boleh hanya dianggap sebagai 'gula-gula' atau pemanis semata, tetapi juga wajib dianggap mampu memperlihatkan kesanggupannya dalam bidang politik, yang mana ini tentunya juga memerlukan bantuan dari segala pihak dan juga upaya dari kandidat perempuan yang bersangkutan.

Berangkat dari apa yang dikatakan oleh Heiki Hermans, dalam konteks Korea Selatan, level perwakilan perempuan yang rendah memang nyatanya tidak menjadikan program-program untuk menyoroti kepentingan perempuan menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan suksesnya Korea Selatan menjalankan program pro-perempuan, dimana jumlah kematian ibu dan bayi menjadi berkurang, lalu ada kesetaraan dalam level pendidikan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya jumlah pertambahan masyarakat, serta kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama bagi keduanya (Syafputri, 2014). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tetap saja dari segi kepentingan, ada diskrepansi kedua jenis kelamin tersebut, yang mana ini menjadi cukup mengkhawatirkan untuk perempuan karena bukan tidak mungkin kepentingannya bisa aja terabaikan. Menurut Anne-Marie Goetz dan Shireen Hassim, partisipasi perempuan dalam politik dan publik merupakan salah satu pre-existing conditions bagi demokrasi seutuhnya. Artinya apabila perempuan ikut serta membuat kebijakan, tentunya akan sangat besar juga peluang untuk adanya kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi.

Penting untuk diketahui bahwa konstruksi biologis dan sosial perempuan itu menjadi dua hal yang berbeda dan menjadi poin yang memang harus dipahami secara baik apabila perempuan ingin terwakili dalam politik. Karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kepentingan perempuan dan laki-laki ini berbeda bahkan sering kali bertentangan, makanya laki-laki bisa dikatakan tidak bisa sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Contohnya, perempuan rentan terkena penyakit seperti kanker payudara ataupun kanker serviks, sedangkan laki-laki tidak, khawatirnya karena laki-laki tidak bisa terkena penyakit itu, hal-hal tersebut yang dianggap penting untuk perempuan justru diabaikan begitu saja. Oleh karenanya, dari sini sudah bisa terlihat bahwa memang perlu ada perwakilan perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan seperti membuat Undang-Undang yang bisa memfasilitasi perempuan agar dapat terhindar dari penyakit-

penyakit ganas tersebut, misalnya memberikan vaksin atau kontrol rutin per-6 bulan sekali dengan harga yang affordable agar seluruh perempuan bisa rutin melakukan kontrol kesehatannya. Jadi memang perempuan wajib hadir (present) dan memberi makna (influence) supaya program dan kebijakan yang diciptakan parlemen menjadi suportif gender (Women Research Institute).

### **Peluang Sistem Representasi Proporsional dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Sistem proporsional (proportional system) merupakan salah satu sistem pemilihan yang mencermati perbandingan jumlah masyarakat dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Dalam sistem ini jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai politik di daerah pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan suara yang diperoleh partai bersangkutan. Sehingga kelompok minoritas-pun bisa ikut memperoleh representasi yang setara dengan dukungan pemilihannya sebab sistem ini terlihat lebih bisa memperantarai suara masyarakat, hal ini dikarenakan setiap suara dihitung sehingga tidak ada suara yang terbuang. Adanya sistem representasi proporsional ini nyatanya juga cukup memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut andil dalam setiap pemilihan baik itu eksekutif maupun legislatif, mengingat saat ini kebanyakan dari pemimpin yang ada adalah laki-laki.

Dalam konteks ini, negara yang menggunakan sistem presidensial seperti Korea Selatan juga sudah menjalankan sistem representasi proporsional dalam rangka perwakilan perempuan di parlemen. Artinya Korea Selatan telah membebaskan semua partai agar bisa memaksimalkan totalitas suara yang didapat tanpa melihat darimana asal usulnya, tentu hal ini sangat berguna untuk para calon kandidat perempuan dari partai kecil dan lemah untuk berpeluang menjadi anggota parlemen. Sistem Representasi Proporsional memang terlihat lebih baik untuk perempuan karena mencoba memberikan kesempatan lebih besar bagi para calon kandidat, kemudian kapasitasnya pun lebih banyak dalam merekomendasikan perempuan ketika ditantang oleh partai lain serta partai juga tidak akan disulitkan jika mencalonkan seorang perempuan sebagai kandidat. Dalam sistem ini pembagian kekuasaan partai juga lebih jelas sehingga semua partai memiliki maksud dan tujuan yang sama di lembaga legislatif. Berdasarkan hal tersebut, partai yang sudah memberikan peluang bagi hak politik perempuan sebagai kandidat anggota legislatif dan terpilih, maka keputusan-keputusan yang diambil akan memberikan nuansa “perempuan” dalam produk perundang-undangannya. Metode 30% keterwakilan perempuan pada SMD Korea Selatan, diyakini sebagai pemilihan demokratis yang efektif pada pemilu legislatif, sedangkan pada instrument pemilu dengan menggunakan proporsional memberikan “equality of votes”.

Dengan demikian, penerapan proporsional representatif dianggap bisa menjadi peluang dan menjadikan kesempatan perempuan dalam keterwakilan politik pemilu legislatif menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, meskipun sistem representasi proporsional memberikan peluang yang lebih besar dan pasti membawa perbaikan dalam sistem pemilihan yang nantinya akan menyokong perempuan meningkatkan level keterwakilannya, namun sayangnya tetap saja tidak ada jaminan yang pasti bahwa hasilnya akan segera terpenuhi sesuai dengan ekspektasi. Bahkan di sebagian negara-negara berkembang pun sistem representasi proporsional dianggap masih tidak bisa membantu para perempuan.

### **Factor-faktor Penghambat Perempuan Saat Ingin Menjadi Anggota Parlemen**

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa perempuan dan laki-laki keduanya memiliki banyak keunggulan dan rasio populasi keduanya pun tidak terpaut jauh, yang mana hal ini semestinya bisa menjadi peluang bagi perempuan untuk ikut terjun langsung di ranah publik yang lebih luas lagi seperti halnya politik. Di Korea Selatan, dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam politik, ekonomi, sipil atau kehidupan budaya berdasarkan jenis kelamin, agama atau status sosial”. Kemudian di Pasal 24 juga ditegaskan bahwa perempuan memiliki kuasa yang sama dengan laki-laki untuk bebas memilih dalam pemilu. Tetapi, karena

Korea Selatan ini masih menganut pandangan konfusianisme (didominasi laki-laki) (Kim, 1994), maka standar etika dan sosial disini dijadikan landasan sosiopolitik yang mana sangat diperjelas dengan adanya peran publik dan domestik antara perempuan dan laki-laki (Lee, 1996), jadi prinsip idealnya perempuan itu hanya harus berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak, sementara laki-laki menjadi wakil keluarga di ranah publik (Hermanns, 2006, p. 2).

Ajaran Konfusius ini memang terlihat masih melekat pada cara berpikir masyarakat disana, yang mana membuat negara Korea Selatan ini seringkali mendapat sebutan “patriarchal democracy” (Soh, 1993). Artinya memang dalam hal ini perempuan kurang dipercaya oleh parpol atas kapasitas yang dimilikinya untuk ikut terlibat dalam politik (Moon, 2003). Selain itu, adanya kendala dalam biaya juga membuat perempuan disana mengalami kesulitan untuk mencoba menunjukkan kemampuannya dalam hal berkompetisi untuk mendapatkan kursi di Parlemen. Hal ini kemungkinan terjadi karena partai politik di Korea Selatan menggunakan pendekatan “Party Centered”, dimana semua dana yang masuk seperti halnya sumbangan, iuran anggota ataupun subsidi dari pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan kampanye, tetap harus mendapatkan persetujuan partai sebelum mengeluarkan dananya (Shin, Jin, Gross, & Eom, 2005). Dalam konteks ini, struktur kekuasaan partai memang begitu kuat, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kandidat yang bisa unggul disuatu daerah adalah yang memang partai dan kandidatnya itu kuat. Contohnya, apabila pemimpin partai X adalah orang kelahiran Kota Z, maka kandidat legislatif dari partai X akan punya peluang yang sangat tinggi untuk menang di Kota Z.

Banyak kasus diberbagai negara termasuk Korea Selatan, yang mana perempuan masih sangat sulit untuk ikut dalam politik. Bahkan dari sisi lingkungan, publik, budaya dan sosial pun seringkali tidak berpihak kepada mereka, inilah yang membuat masih adanya berbagai kendala bagi perempuan untuk mengutarakan kepentingannya. Kendala-kendala ini sekiranya dikategorikan melalui tiga hal yaitu politik, sosio-ekonomi, dan ideologi serta psikologi (atau sosio-kultural).

### **Kendala-kendala dalam wilayah politik**

**Pertama**, ada kebiasaan yang melekat pada kehidupan politik di Korea Selatan yakni apa yang kita kenal dengan maskulinitas, artinya berbagai urusan publik termasuk politik itu hanya kebanyakan disesuaikan dengan nilai dan gaya hidup laki-laki seperti halnya ide “pemenang dan pencundang” yang pada akhirnya malah menciptakan selisih paham dan perpecahan, bukannya saling menghormati satu sama lain. Hal-hal tersebutlah yang tentunya menjadi pertentangan tersendiri bagi perempuan, karena kita tahu, perempuan identik dengan lemah lembut serta cinta akan perdamaian, dimana ini juga membuat adanya perbedaan-perbedaan saat keduanya ingin mengambil suatu keputusan mengenai suatu kepentingan apalagi yang sifatnya prioritas. Dalam hal ini, perempuan biasanya akan lebih memprioritaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, misalnya jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat dan juga anak.

Berdasarkan hal tersebut, perempuan dinilai memiliki kemampuan yang bisa dikatakan setara dengan laki-laki, karena mereka mau tidak mau dituntut harus bisa membagi waktunya antara urusan publik dan domestik. Mereka pun memiliki sifat pekerja keras karena selain memang harus mengurus partai dan rumah, perempuan juga harus membantu komite dan juga harus selalu berhubungan baik dengan berbagai jaringan perempuan baik itu di intern parlemen maupun diluar daripada itu. Dan hal itu tentunya menuntut perempuan untuk bisa balance antara urusan rumah tangga dan berbagai desakan pekerjaan yang memang sering menghabiskan waktu.

**Kedua**, masih kurangnya dukungan dari parpol. Menurut data, pemimpin partai adalah seorang perempuan itu bisa dikatakan sangat kurang dari rata-rata karena hanya sekitar 11% saja. Dalam hal ini, perempuan tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang telah dilakukan oleh partai politik saat kampanye pemilihan. Hal ini terlihat dari tidak adanya dukungan dana yang cukup bagi para kandidat perempuan. Begitu juga dengan proses seleksi yang dilakukan oleh partai terkesan sifatnya bias

karena lagi-lagi ada nilai laki-laki didalamnya, yang akhirnya berujung meremehkan kemampuan perempuan itu sendiri dan menjadi penghalang bagi perempuan untuk ikut dinominasikan. Tentunya permasalahan ini tidak adil bagi perempuan, karena nama mereka seringkali dimasukkan didaftar partai dengan tujuan supaya mereka tidak terpilih apabila partainya tidak sesuai saat pemilihan.

**Ketiga**, komunikasi dan kerjasama antara perempuan dan organisasi lain seperti halnya buruh dan organisasi-organisasi perempuan masih dinilai sangat kurang. Bahkan terlihat bahwa organisasi perempuan ini cenderung menjaga jarak pada anggota parlemen perempuan, padahal sebenarnya dukungan dari organisasi perempuan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam badan-badan legislatif. Dengan adanya dukungan tersebut harapannya bisa menciptakan kesetaraan gender pada kehidupan politik, karena ini merupakan salah satu alat untuk mempertahankan kuota 30% agar perempuan bisa tetap berada pada semua tingkat pengambilan keputusan. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari segala pihak khususnya kelompok-kelompok perempuan dengan tujuan membantu perempuan yang telah menempati kursi parlemen supaya dapat memanifestasikan janji-janji mereka perihal menjamin isu-isu perempuan yang nantinya akan dibicarakan dalam perbedaan dan diskursus yang berlangsung di parlemen.

**Keempat**, pelatihan dan pendidikan perihal pentingnya kepemimpinan perempuan juga belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, memang dibutuhkan pengembangan pendapat mengenai apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perempuan jika ingin terjun ke dalam politik. Harapan kedepannya ini bisa memberikan akses kepada perempuan supaya bisa lebih terlibat didalam politik, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan training kepada orang-orang yang berada pada RT/RW bersangkutan, selain itu juga menjadi sangat penting untuk memberikan pengetahuan umum yang berkaitan dengan urusan-urusan perempuan dengan harapan bisa menimbulkan kesadaran politik yang mengedepankan gender dan keahlian lobi dan jaringan pekerjaan.

### **Kendala-kendala dalam wilayah sosio-ekonomi**

**Pertama**, kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini, belum tercukupinya sumber keuangan, masih tingginya angka buta huruf serta masih terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pilihan profesi tentunya memang menjadi pemicu sulitnya untuk menghilangkan ketidakseimbangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Lebih daripada itu, berbagai macam riset pun mengatakan bahwa hingga detik ini penindasan dalam konteks gender seperti gaji, rekrutmen, promosi dan pemecatan, maupun segregasi profesional dan feminisasi kemiskinan itu justru semakin meningkat. Berdasarkan statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 1,3 milyar penduduk didunia hidup dalam kemiskinan dan parahnya 70% diantaranya adalah perempuan. Padahal perempuan disini memiliki peran yang cukup besar dalam ekonomi nasional melalui pekerjaannya sebagai buruh upah maupun tanpa upah dan tentunya hal ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran dalam mengikis kemiskinan, yang mana ini memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam demokrasi. Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti memberikan pendidikan dan akses informasi, yang mana harapannya ini dapat membebaskan perempuan dari keterkurungan rumah tangga dan akhirnya bisa berakhir pada pemenuhan partisipasi dalam politik dan pemilihan yang politis.

**Kedua**, tanggungan beban ganda seperti halnya pekerjaan rumah tangga dan kewajiban profesional diruang publik. Dalam konteks ini, harus diakui bahwa menjadi perempuan memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena apabila mereka ingin ikut berpartisipasi di ranah publik, maka mereka berarti harus sudah siap untuk meluangkan waktu lebih untuk mengurus keluarga dan pekerjaannya diluar rumah. Beban ganda (double burden) sendiri artinya salah satu dari kedua jenis kelain lebih banyak mengembang pekerjaan dibanding dengan yang. Beban ganda ini mencakup pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, mengasuh anak. Dan juga pekerjaan publik seperti halnya mencari nafkah diluar rumah. Dalam

hal ini, beban ganda bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yakni khususnya pada perempuan pekerja dan hal yang mempengaruhinya sudah jelas adalah budaya patriarki yang masih melekat, sehingga apabila seorang perempuan lalai maupun itu sedikit saja dalam melakukan tanggung jawabnya di ranah domestik, maka akan langsung di klaim sebagai seseorang yang melanggar perintah agama (Islam) (Hidayati, 2015).

### **Kendala-kendala dalam wilayah ideologis dan psikologis**

**Pertama**, ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang telah diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Di kebanyakan negara, tradisi-tradisi yang ada justru menghalangi majunya progres dan keterlibatan perempuan dalam setiap sistem politik. Ini juga yang membuat politisi perempuan dan anggota parlemen khususnya perempuan harus mengalami sulitnya diperlakukan kurang menyenangkan dalam wilayah politik, yang mana hal ini tentunya mnyebabkan mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terusik. Oleh sebab itu, seorang perempuan memang harus lebih siap secara mental dalam menyambangi fakta bahwa ketika harus menjadi seorang politisi, maka tugasnya sebagai perempuan pun tidak bisa berhenti, sehingga perempuan harus lebih bisa membuktikan kalo mereka bisa melakukan semuanya dengan balance, karena mereka memiliki banyak potensi kreatif dan juga kekuatan intelektual.

**Kedua**, perempuan seringkali masih belum percaya diri bahwa mereka mampu dalam hal pencalonan diri. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama keterwakilan perempuan dalam politik formal seperti halnya parlemen, pemerintahan serta partai politik itu menjadi sangat minim. Oleh karena itu, kepercayaan diri dan tekad yang bulat itu harus benar-benar tumbuh dalam diri perempuan kalau memang ingin ikut terlibat dalam perpolitikan, buang saja mindset yang mengatakan pemimpin haruslah laki-laki, karena sejatinya perempuan dan laki-laki itu memiliki potensi yang seimbang. Bahkan banyak juga perempuan hebat diluar sana yang dijadikan juru kampanye, organisatoris dan sebagainya. Oleh karenanya, adanya rasa khawatir berlebih itulah yang harus dibuang jauh-jauh karena hal tersebut hanya akan menghalangi perempuan untuk berkembang dan terlibat dalam kehidupan politik.

**Ketiga**, cara bagaimana perempuan dideskripsikan dalam media massa. Dalam konteks ini, media massa di berbagai negara diketahui memang memiliki 2 peran yakni yang pertama sebagai orang yang mencatat berbagai macam fenomena yang sedang berlangsung dan yang kedua sebagai pemberi informasi kepada publik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Tetapi dalam konteks ini, media massa justru seakan tidak berpihak kepada perempuan karena minimnya liputan yang berhubungan dengan perempuan seperti jarang memberikan informasi secara layak perihal hak dan peran perempuan didalam masyarakat itu sendiri. Kemudian juga bisa dibilang jarang memberitakan informasi yang berkaitan berkaitan dengan cara pemerintah untuk lebih meningkatkan posisi perempuan.

Bahkan lebih tragisnya lagi, media justru seringkali menganggap perempuan hanya sebagai objek bukan subjek. Artinya dalam hal ini perempuan seringkali dikenal hanya bergantung pada gendernya yang seakan memang hadir karena kecantikan dan daya tariknya semata tanpa melihat kapasitas dan potensi besar yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Hal-hal seperti inilah menyebabkan stereotipe patriarki mengenai “perempuan hanyalah kaum lemah, objek seksual serta warga negara kelas dua” menjadi semakin merajalela. Oleh sebab itu, memang perlu ditekankan kepada media massa bahwa sikap mereka yang masih sangat minim terhadap perempuan itu kedepannya harus lebih netral dan harus lebih mendukung perempuan atau calon-calon kandidat perempuan.

## **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari data yang diperoleh dalam hasil dan pembahasan dapat dikatakan bahwa memang benar di Korea Selatan masih terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam menduduki kursi di Parlemen. Hal ini dikarenakan perempuan dalam hal ini belum bisa terlibat secara signifikan seperti halnya laki-laki di legislatif, padahal kehadiran perempuan di Parlemen merupakan suatu

hal yang sangat penting karena dianggap dapat membawa ide dan gagasan yang bisa merepresentasikan kepentingan konstituennya. Hadirnya sistem representasi proporsional memang terlihat memberikan peluang yang cukup positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen Korea Selatan melalui kuota 30% yang diyakini cukup memberikan hal yang baik bagi pemilihan yang efektif dan efisien dalam pemilu legislatif. Meskipun memang tidak sepenuhnya juga sistem representasi proporsional ini bisa membawa perubahan hasil yang sedemikian signifikan, tetapi setidaknya adanya sistem ini cukup membantu perempuan dalam memperbaiki peningkatan representasinya, atau bisa dikatakan pelan-pelan tapi hasilnya cukup membawa perubahan-perubahan lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

Namun, sayangnya juga walaupun sudah ada sistem representasi proporsional, nyatanya tetap masih ada hambatan-hambatan bagi perempuan ketika ingin menjadi anggota parlemen, yang mana bisa dikategorikan melalui tiga wilayah yaitu politik, sosio-ekonomi, dan sosio-kultural. Dalam konteks Korea Selatan, hal yang paling menghambat perempuan adalah sistem budaya patriarkis dan sistem rekrutmen partai politik yang notabennya memang lebih mengutamakan pria ketimbang wanita dalam ranah politik. Begitu juga dalam sistem pemilihan perihal biaya kampanye, yang mana Di Korea Selatan, biaya kampanye yang dilakukan oleh partai biasanya diawasi secara ketat dengan para pengawas internal dan eksternal. Hambatan di biaya kampanye ini memang cukup penting untuk menjadi bahan pembanding peta politik dalam sebuah parlemen karena hal tersebutlah yang membuat perempuan Korea Selatan menjadi kesulitan untuk menampilkan dirinya dalam berkompetisi untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Oleh karenanya, memang diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan ini seperti dengan membangun serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di politik dan parlemen, lebih meningkatkan lagi pendidikan untuk perempuan serta berusaha untuk menstabilkan ekonomi yang nantinya guna mempermudah perempuan untuk ikut serta dalam wilayah politik (Gollifer, 2013). Kalau perihal menyelesaikan efek dari budaya yang ada, kemungkinan memang bukan perihal sederhana untuk diatasi dalam kurun waktu yang sebentar. Sehingga dibutuhkan pelaksanaan kampanye yang bisa meningkatkan kesadaran publik mengenai kesetaraan gender serta membuka ruang-ruang aspirasi dan strategi aksi afirmatif (Norris & Inglehar, 2000). Dalam konteks ini pun, jika ingin sukses dan berhasil dalam pemilu, perempuan juga harus bisa membentuk relasi dan kolaborasi yang baik dengan masyarakat ataupun kelompok-kelompok perempuan, itupun harus secara rutin bukan hanya saat ingin pemilu saja. Hal ini penting untuk dilakukan supaya tidak membuat kesan “politisi karbitan” atau kasarnya politisi yang hanya mendekati masyarakat saat ingin pemilu saja agar bisa memperoleh suara yang banyak. Karena sejatinya politisi disini bukan seperti itu, mereka harus bisa selalu memberikan pendidikan politik dan mendengarkan ide-ide dan kepentingan dari kaumnya dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brata, D. S., Siahaan, L. A., & Rizki, M. A. (2015, November 16). *Parlemen Korea Selatan Dan Legislatif Nasional*. Fisip.ui.ac.id. Retrieved April 8, 2022, from [https://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/11/16/parlemen-korea-selatan-dan-legislasi-nasional/#\\_ftn1](https://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/11/16/parlemen-korea-selatan-dan-legislasi-nasional/#_ftn1)
- Center For Election and political Party (CEPP) FISIP UI. (2015, November 16). *Parlemen Korea Selatan Dan Legislatif Nasional*. Cepp.fisip.ui.ac.id. Retrieved April 22, 2022, from [https://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/11/16/parlemen-korea-selatan-dan-legislasi-nasional/#\\_ftn1](https://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/11/16/parlemen-korea-selatan-dan-legislasi-nasional/#_ftn1)
- Hayat. (2015). *Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women's Representation In Parliament)*. 1-36.
- Hevriansyah, A. (2021). *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1(1), 67-85.
- Hidayati, N. (2015, Desember). *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*. Jurnal Muwazah, 7(2), 108-119.

- Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N. (2022, Februari). *Upaya Korea Women's Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1), 288-300.
- Ri'aeni, I., & Machsunah, U. (2020, Januari-April). *Sosialisasi jelang Pemilu Legislatif pada Televisi Lokal: Partisipasi Perempuan di Panggung Politik*. SWADAYA: Indonesian Journal of Community Empowerment, 2(1), 23-29.
- Syafputri, E. (2014). *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan*. Indonesian Journal of International Studies (IJIS), 1(2), 165-175.
- Syams, A., & Maxim, S. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Bahasa Indonesia ed.)*. International IDEA.
- Women Research Institute. (n.d.). *Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. wri.or.id. Retrieved Mei 1, 2022, from <https://www.wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen.html#.Ym6syaSIYIQ>